

MULTIFUNGSI PERKEBUNAN SAWIT DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Oleh
PASPI-Monitor

RESUME

Sektor pertanian merupakan kegiatan ekonomi tertua di bumi, bahkan menjadi bagian evolusi budaya dan peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu. Selain menghasilkan produk pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan manusia, sektor pertanian juga memiliki peranan/fungsi lainnya yang dikenal dengan multifungsi pertanian (*multifunctional agriculture*) yang telah menghasilkan multimanfaat dan dirasakan lintas generasi sejak awal peradaban manusia di bumi. Konsep multifungsi pertanian mulai menjadi pembahasan ditingkat internasional pada saat Rio Earth Summit tahun 1992, dimana dalam konsep tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki multifungsi yang penting yaitu fungsi ekonomi (*white function*), fungsi sosial budaya (*yellow function/services*), serta dua fungsi ekologi yang terdiri dari pelestarian tata air (*blue services*), dan pelestarian sumberdaya alam (*green function*).

Dalam konsep multifungsi pertanian, perkebunan sawit sebagai bagian dari sektor pertanian juga telah terbukti berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh para ahli memiliki empat fungsi penting yaitu fungsi ekonomi (*white function*), fungsi sosial budaya (*yellow function/services*), fungsi pelestarian tata air (*blue services*), dan fungsi pelestarian sumberdaya alam (*green function*). Multifungsi perkebunan sawit telah dinikmati masyarakat lintas generasi baik masyarakat Indonesia bahkan masyarakat global baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung.

Di sisi lain, *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan platform pembangunan global yang diluncurkan oleh PBB tahun 2015 dan telah diadopsi oleh negara-negara di dunia, sebenarnya merupakan "jalan tengah" dari dua paradigma yang terpolarisasi terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yakni *developmentalis* dan *environmentalis*. Paradigma baru ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat dikelola secara optimal sehingga dapat menghasilkan tujuan pembangunan ekonomi, sosial dan pelestarian lingkungan secara harmoni yang dapat dinikmati dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dari 17 tujuan SDGs dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama yaitu ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*).

Jika ditelaah secara lebih dalam, SDGs memiliki kesamaan dengan aspek dalam konsep multifungsi pertanian yakni istilah 3-P atau yang dapat diterjemahkan menjadi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep multifungsi pertanian merupakan akar dari SDGs, sehingga sektor pertanian secara implisit telah memenuhi prinsip SDGs dan merupakan sektor yang *sustainable*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkebunan sawit yang memiliki multifungsi juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan dan terbukti *sustainable* dibandingkan. Oleh karena itu, masalah *sustainability (sustainability vs unsustainability)* pada perkebunan kelapa sawit tidak perlu dipertanyakan lagi.

PENDAHULUAN

Sebelum tahun 1980-an, terdapat dua perspektif/mahzab terkait pengelolaan sumberdaya alam yang saling bertentangan yaitu mahzab *developmentalis* dengan perspektif pembangunan dan mahzab *environmentalis* dengan perspektif lingkungan hidup. Konsep *developmentalisme* pertama kali digagas oleh Harry S Truman, Presiden Amerika Serikat periode tahun 1945-1953, dimana konsep ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan masalah ekonomi lainnya. Kaum mahzab *developmentalis* memiliki pespektif bahwa sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus dimanfaatkan dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Namun, konsep pembangunan konvensional ini mendapatkan kritikan karena hanya bersandar pada indikator pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek lainnya seperti lingkungan dan sosial. Atas dasar kritik tersebut, lahirlah mahzab *environmentalis* yang memiliki prespektif bahwa sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus dipertahankan/dilindungi agar sumber kehidupan di planet bumi dapat berkesinambungan dari generasi ke generasi. Kaum *environmentalis* juga menganggap pembangunan ekonomi hanya akan merusak/ menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Titik temu antara kaum *developmentalis* dengan *environmentalis* mulai terbentuk ketika *World Commission on Environment and Development* (WCED) mempublikasikan laporan tahunan di tahun 1987 yang dikenal dengan *Our Common Future* atau laporan Brundlandt. Dalam laporan tersebut mulai memperkenalkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), istilah tersebut dimaknai sebagai "*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*".

Selanjutnya, paradigma *Sustainable Development* kemudian resmi menjadi platform pembangunan internasional atau yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDGs juga dianggap se-

bagai *roadmap* dengan target pencapaian selama periode tahun 2016-2030 yang telah disepakati bersama oleh 193 negara anggota PBB. Tujuan dari platform SDGs ini dalam rangka mengakhiri kemiskinan dunia, meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan bagi semua orang di seluruh dunia dan melindungi kelestarian planet bumi.

Sebagai platform pembangunan global, SDGs memiliki 17 tujuan/prinsip yang dapat dikelompokkan dalam tiga aspek utama ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Ketiga aspek dalam SDGs tersebut juga menggambarkan konsep "Multifungsi Pertanian". Konsep ini sudah sejak lama diperkenalkan dan menjadi pembahasan dalam diskusi dalam pertemuan internasional seperti *Rio Earth Summit* tahun 1992, namun konsep ini belum dikenal secara luas seperti konsep SDGs. Padahal jika dianalisis terdapat kesamaan dan keterkaitan antara kedua konsep tersebut.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan kesamaan dan keterkaitan antara konsep Multifungsi Pertanian dan prinsip-prinsip SDGs. Sehingga dari tulisan ini dapat menunjukkan bahwa komoditas pertanian (termasuk kelapa sawit) yang memiliki fungsi-fungsi dalam konsep Multifungsi Pertanian, juga turut berkontribusi terhadap pencapaian SDGs.

MULTIFUNGSI PERTANIAN PADA PERKEBUNAN SAWIT

Sektor pertanian merupakan kegiatan ekonomi tertua di bumi. Kegiatan bercocok tanam atau bertani juga menjadi bagian evolusi budaya dan peradaban manusia zaman purba sejak ribuan tahun lalu. Catatan sejarah juga menyebutkan bahwa kegiatan bertani di ladang menjadi awal terbentuknya pemukiman/perkotaan, karena sebelumnya manusia purba selalu berpindah tempat tinggal (*nomaden*) dan melakukan perburuan.

Selain menghasilkan produk pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan manusia, sektor pertanian juga memiliki peran/fungsi lainnya yang dikenal dengan multifungsi pertanian (*multifunctional agriculture*). Konsep multifungsi sektor pertanian ini telah lama berlangsung dan

multimanfaat yang ditimbulkan juga turut dirasakan lintas generasi sejak awal peradaban manusia di bumi, namun isu multifungsi pertanian mulai menjadi pembahasan ditingkat internasional pada saat *Rio Earth Summit* tahun 1992. Deklarasi Komite Menteri-Menteri Pertanian Negara-Negara *Organization of Economic Cooperation Development* (OECD, 2001) mendefinisikan multifungsi pertanian sebagai berikut “*Beyond its primary function of producing food and fiber, agricultural activity can also shape the landscape provide environmental benefits such as land conservation, the sustainable management of renewable natural resources and the preservation of biodiversity, and contribute to the socio-economic viability of many rural areas. Agriculture is multifunctional when it has one or several functions in addition to its primary role of producing food and fiber.*” Artinya selain fungsi utama yakni fungsi ekonomi (menghasilkan bahan pangan dan serat), pertanian juga memiliki fungsi sosial dan fungsi ekologis. Dengan deklarasi tersebut menunjukkan bahwa konsep multifungsi yang melekat pada sektor dan komoditas pertanian (termasuk didalamnya perkebunan) telah diakui dan diterima secara global.

Dalam pengertian yang lebih luas multifungsi pertanian mencakup empat fungsi yakni *green function*, *blue services/function*, *yellow services/function* dan *white function* (Aldington, 1998; Dobbs and Petty, 2001; Moyer and Josling, 2002; Harwood, 2003; Jongeneel and Slangen, 2004; Huylenbroeck, et. al, 2007). *The green functions* meliputi pengelolaan dan pemeliharaan lanskap dan pemeliharaan, pengelolaan satwa liar, pelestarian habitat dan kesejahteraan satwa, pemeliharaan keanekaragaman hayati, perbaikan daur hara, dan penyerap karbon (*carbon sinks*). Fungsi lainnya yang melekat pada sektor/komoditas pertanian adalah *blue functions* terkait dengan pengelolaan air, peningkatan kualitas air, pengendalian banjir, *water harvesting* dan penciptaan energi (angin). Fungsi ketiga yakni *yellow functions* terkait dengan peran sektor pertanian dalam mempererat kohesi di pedesaan, menciptakan iklim kekeluargaan di pedesaan, sebagai warisan budaya dan

bagian dari sejarah, menciptakan identitas regional dan menawarkan jasa agrowisata dan *agro-entertainment*. Dan terakhir, *white functions* yang dihasilkan oleh sektor pertanian terkait dengan keamanan dan ketahanan pangan.

Secara singkat, multifungsi yang melekat dalam sektor pertanian tersebut adalah *white function* menggambarkan fungsi ekonomi, *yellow services* menggambarkan jasa sosial budaya, *blue services* menggambarkan jasa pelestarian tata air, dan *green function* menggambarkan fungsi pelestarian sumberdaya alam. Dari keempat multifungsi pertanian tersebut, hanya *white functions* dimana sektor pertanian dapat menghasilkan produk yang bersifat *tangible and marketable*, sedangkan ketiga fungsi/jasa lainnya yaitu *green functions*, *blue functions*, *yellow functions* merupakan jasa yang tidak tampak/nyata (*intangible services*) dan belum bisa diperhitungkan dalam sistem pasar (perhitungan ekonomi), padahal jasa lingkungan dan budaya tersebut dapat dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali (*non-excludable* dan *non-rivalry*). Implikasi dari hal tersebut menyebabkan masih banyak orang yang memandang sektor pertanian dengan sebelah mata dan dianggap kalah jika dibandingkan dengan sektor lainnya seperti sektor industri atau sektor pariwisata.

Namun saat ini, multifungsi sektor pertanian (dalam arti luas) telah diadopsi di negara-negara maju khususnya Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan lainnya (Aldington, 1998; Dobbs and Petty, 2001; OECD, 2001; Moyer and Josling, 2002; Huylenbroeck, et. al, 2007; Moon, 2012). Selain itu, multifungsi pertanian telah dijadikan sebagai dasar/argumen kebijakan publik (mensubsidi pertanian secara besar-besaran) dan kebijakan perdagangan internasional (*protectionism*). Kebijakan proteksionisme dan subsidi yang diberikan oleh negara-negara tersebut bertujuan untuk “membayar” eksternalitas positif atas jasa ekologis dan sosial yang dihasilkan sektor pertanian yang selama ini tidak memiliki nilai ekonomi dan fungsi tersebut juga tidak termasuk harga yang dibayarkan oleh konsumen.

Indonesia yang juga merupakan negara agraris, dimana sektor ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian yang meli-

batkan jutaan penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani/peternak/ pekebun, juga mengakui konsep multifungsi pertanian. Salah satunya pengakuan atas multifungsi perkebunan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. UU Perkebunan tersebut menyatakan bahwa perkebunan mempunyai tiga fungsi yakni: (1) fungsi ekonomi (peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional); (2) fungsi ekologi (peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung); dan (3) fungsi sosial budaya (sebagai perekat dan pemersatu bangsa).

Dengan demikian, perkebunan sawit (termasuk industri hilirnya) yang menjadi unggulan dari subsektor perkebunan (bagian sektor pertanian) juga memiliki multifungsi pertanian/perkebunan yang melekat (*built-in*) yang tidak hanya dipanen/dinikmati oleh generasi sekarang tapi juga dinikmati generasi yang akan datang di seluruh dunia selama proses pembudidayaan kelapa sawit terus dilakukan. Berikut dijelaskan bukti empiris yang menunjukkan bahwa perkebunan sawit memiliki multifungsi pertanian yang telah dijelaskan diatas.

Secara empiris fungsi ekonomi yang juga menggambarkan *white function* dari perkebunan sawit telah banyak dibuktikan berbagai ahli, diantaranya adalah peningkatan pendapatan petani, penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, pembangunan ekonomi daerah, penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru di pelosok daerah, hingga menjadi sumber devisa dan pendapatan negara (Tomic dan Mawardi, 1995; Sato, 1997; Susila, 2004; Sumarto dan Suryahadi, 2004; Joni, 2012; Rofiq, 2013; World Growth, 2009, 2011; PASPI, 2014). Bahkan manfaat ekonomi sawit juga dinikmati masyarakat global, misalnya masyarakat Uni Eropa. Impor CPO yang dilakukan memberi manfaat besar baik terhadap GDP, penerimaan pemerintah maupun meningkatkan kesempatan kerja Uni Eropa (Europe Economics, 2014).

Demikian juga dengan fungsi sosial budaya atau *yellow function/services* dari perkebunan sawit juga telah terbukti secara

empiris antara lain peranannya dalam pembangunan pedesaan, memperbaiki kualitas kehidupan dan pengurangan kemiskinan baik di tingkat daerah maupun nasional (Sumarto&Suryahadi, 2004; Susila, 2004; Gunadi, 2008; World Growth, 2009, 2011; Joni, 2012; Rofiq, 2013; PASPI, 2014). Selain itu sumberdaya manusia yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit disetiap daerah merupakan suatu persekutuan keragaman antar etnis di Indonesia. Keterlibatan multietnis dalam kegiatan ekonomi berarti juga bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu wadah pelestarian keragaman interaksi sosial antar etnis/budaya. Kelembagaan kerja sama Perkebunan Inti Rakyat (PIR) merupakan perpaduan antara nilai budaya lokal (*local wisdom*) dengan manajemen modern yang dirancang (*institution engineering*) agar petani kecil/lokal ikut di dalam perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hal tersebut menggambarkan bagian fungsi sosial dari perkebunan kelapa sawit.

Berbagai penelitian juga membuktikan bahwa fungsi ekologis yang merefleksikan *green functions* dari perkebunan sawit mencakup pelestarian daur karbon dioksida dan oksigen (proses fotosintesis), restorasi *degraded land* akibat *logging* maupun pertambangan, konservasi tanah serta peningkatan biomas dan karbon stok lahan (Henson, 1999; Harahap dkk, 2005; Fairhurst&Hardter, 2004; Chan, 2002), bahkan berkontribusi mengurangi emisi gas rumah kaca dan restorasi lahan gambut (Murayama dan Baker, 1996; Melling et.al. 2005, 2007; Sabiham, 2013). Selain itu, pengembangan biodiesel sawit yang dilakukan baik di Indonesia maupun negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat telah berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon global sebagai upaya pencegahan dan meminimisasi dampak pemanasan dan perubahan iklim global.

Sementara itu, fungsi ekologis yang secara khusus terkait dengan fungsi tata air (*blue services*) pada perkebunan sawit dapat ditunjukkan oleh hasil penelitian Makonnen & Hoekstra (2010) terkait konsumsi air yang dibutuhkan kelapa sawit yang sebagian besar berasal dari *green water* atau air hujan dengan indikator *water footprint* yang lebih rendah dibandingkan tanaman serelia

(seperti gandum, padi, jagung) dan kedelai. Kebutuhan air pada tanaman kelapa sawit juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan tanaman hutan (Coaster, 1938; Pasaribu *et al.*, 2012). Hal ini menunjukkan keberadaan perkebunan sawit yang tidak mengancam sumber air dan menyebabkan kekeringan.

17 TUJUAN DAN PRINSIP SDGs

Konsep pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai “jalan tengah” dari dua

paradigma yang terpolarisasi yakni *developmentalis* dan *environmentalis*. Paradigma baru ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat dikelola secara optimal sehingga dapat menghasilkan tujuan pembangunan ekonomi, sosial dan pelestarian lingkungan secara harmoni yang dapat dinikmati dalam jangka panjang. Platform SDGs terdiri dari 17 tujuan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030 (Gambar 1).



Gambar 1. Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

Dari ketujuh belas tujuan SDGs tersebut dapat diklasifikasi menjadi tiga aspek sebagai berikut. **Pertama**, Tujuan dalam Aspek Ekonomi (8 SDGs) yakni: (a) Menghapus kemiskinan berbagai bentuk dan seluruh tempat/SDG-1; (b) Menghapus kelaparan, kekurangan gizi dan membangun ketahanan pangan inklusif/SDG-2; (c) Membangun energi yang berkelanjutan/SDG-7; (d) Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang inklusif/SDG-8; (e) Infrastruktur dan industrialisasi dan inovasi/SDG-9; (f) Pengurangan ketimpangan/SDG-10; (g) Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan/SDG-12; dan (h) Kerjasama global pembangunan berkelanjutan/SDG-17.

Kedua, Tujuan dalam Aspek Sosial (6 SDGs) yakni: (a) Kesehatan dan kesejahteraan/SDG-3; (b) Pendidikan berkualitas yang inklusif/SDG-4; (c) Kesamaan *gender*/SDG-5; (d) Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang inklusif/SDG-6; (e) Pembangunan kota dan desa (pemukiman) yang inklusif, aman dan berkelanjutan/SDG-11; dan (f) Perdamaian dan keadilan sosial yang inklusif/SDG-16.

Ketiga, Tujuan dalam Aspek Lingkungan (3 SDGs) yakni: (a) Mengatasi perubahan iklim global dan dampaknya/SDG-13; (b) Konservasi dan pemanfaatan sumberdaya perairan secara berkelanjutan/SDG-14; dan (c) Pengelolaan biodiversitas, ekosistem daratan dan hutan secara berkelanjutan/SDG-15.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan pengelolaan berupa kebijakan pemerintah, sehingga prinsip dalam konsep tersebut bukan hanya 3-P (*Profit, Planet, People*), melainkan 4-P (*Profit, Planet, People, Policy*) (Feher and Beke, 2013; Moon, 2012). Pencapaian SDGs di setiap negara akan berbeda-beda, karena ditentukan oleh masing-masing kebijakan pemerintah negara tersebut. Selain itu, penekanan baru dari SDGs juga adalah inklusifitas (*no one left behind*) dari setiap aspek atau prinsip/kriteria. Inklusif secara ekonomi, bukan hanya diukur hanya pada level perusahaan (eksklusif) seperti pencapaian laba, tetapi juga diukur dampak kehadiran aktifitas perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan baik di tingkat lokal/regional, nasional maupun global. Hal

tersebut juga terkonfirmasi dari konsep World Bank (2012) mengajukan konsep sederhana yakni *Growth, Green, Inclusive*. Pertumbuhan ekonomi (*growth*) haruslah tetap memperhatikan kelestarian lingkungan (*green*) dan manfaatnya dirasakan secara luas (*inclusive*).

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan bahwa terdapat kesamaan antara konsep multifungsi pertanian dan SDGs. Ketujuh belas tujuan dalam SDGs dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang menggambarkan 3-P (*profit, people, planet*). Serupa dengan hal tersebut, konsep multifungsi pertanian dapat dikelompokkan dalam tiga aspek yang sama (ekonomi, sosial dan lingkungan) dan juga dapat menggambarkan 3-P yakni *profit (white function), people (yellow function), dan planet (green function and blue function)*. Kesamaan diantara kedua konsep tersebut menunjukkan adanya korelasi.

Konsep multifungsi pertanian yang lebih dahulu diperkenalkan pada tahun 1992 dapat dianggap sebagai akar dari tujuan dan prinsip yang terdapat dalam SDGs. Selain itu, kedua konsep ini juga telah diakui dan diterima dalam skala internasional serta diadopsi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian secara implisit telah memenuhi prinsip SDGs, yang artinya sektor pertanian adalah sektor yang *sustainable* dan komoditas pertanian adalah komoditas yang *sustainable*.

Perkebunan kelapa sawit (termasuk industri hilir) merupakan salah satu sektor strategis di Indonesia telah terbukti memiliki multifungsi pertanian yang berhasil menghasilkan multimanfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di desa/daerah tersebut, di Indonesia atau seluruh dunia baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung seperti masyarakat pada umumnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit (termasuk industri hilir) adalah sektor yang *sustainable* dan mampu secara proaktif dengan memposisikan diri sebagai bagian solusi yang berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan SDGs baik level lokal/daerah, nasional maupun global. Fakta tersebut sebagai bukti sekaligus jawaban atas tuduhan pihak anti-sawit yang menyudutkan industri

sawit yang dianggap tidak berkelanjutan (*unsustainable*).

KESIMPULAN

Dalam konsep multifungsi pertanian yang sudah diperkenalkan sejak tahun 1992, menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki multifungsi yang penting yaitu fungsi ekonomi (*white function*), fungsi sosial budaya (*yellow function/services*), serta dua fungsi ekologi yang terdiri dari pelestarian tata air (*blue services*), dan pelestarian sumberdaya alam (*green function*). Perkebunan sawit sebagai bagian dari sektor pertanian juga memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dapat dinikmati masyarakat lintas generasi baik masyarakat Indonesia bahkan masyarakat global baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa perkebunan sawit memiliki multifungsi pertanian.

Di sisi lain, *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan platform pembangunan global yang diluncurkan oleh PBB tahun 2015 dan telah diadopsi oleh negara-negara. Platform SDGs menggambarkan tiga dimensi/pilar utama yaitu ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*). Jika ditelaah, SDGs memiliki kesamaan dengan konsep multifungsi pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa konsep multifungsi pertanian merupakan akar dari SDGs, sehingga sektor pertanian secara implisit telah memenuhi prinsip SDGs dan merupakan sektor yang *sustainable*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkebunan sawit yang memiliki multifungsi juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan dan terbukti *sustainable* dibandingkan. Oleh karena itu, masalah *sustainability (sustainability vs unsustainability)* pada perkebunan kelapa sawit tidak perlu dipertanyakan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldington TJ. 1998. *Multifunctional Agriculture: A Brief Review from Developed and Developing Country Perspectives*, unknown status. FAO Agriculture Department, Internal Document.2
- Chan KW. 2002. *Oil Palm Carbon*

- Sequestration and Carbon Accounting: Our Global Strength*. MPOA.
- Dobbs TL, Pretty JN. 2001. *The United Kingdom's Experience with Agri-Environmental Stewardship Schemes: Lessons and Issues for the United States and Europe*. Tersedia pada: <http://agecon.lib.umn.edu/cgi-bin/detailview.pl?paperid=2436>
- Europe Economics. 2014. *The Economic Impact Of Palm Oil Imports In The EU*. London: Europe economics
- Fairhurst T, R Hardter. 2004. *Oil Palm: Management for Large and Sustainable Yields*. Oxford Graphic Printers, Pte Ltd.
- Feher I, J Beke. 2013. The Rational Of Sustainable Agriculture. *Iustum Aequum Salutare*. 9(3): 73-87.
- Goenadi. 2008. *Prospective on Indonesian Palm Oil Production*. Paper Presented on The International Food and Agriculture Policy Council. Spring 2008 Meeting. Bogor
- Harahap IY, Y Pangaribuan, HH Siregar, E Listia. 2005. *Lingkungan Fisik Perkebunan Kelapa Sawit*. Medan:PPKS
- Henson I. 1999. *Comparative Ecophysiology of Palm Oil and Tropical Rainforest*. Oil Palm and Environment A Malaysian Perspective. Malaysian Oil Palm Brower Council. Kuala Lumpur.
- Huylenbroeck GV, V Vandermulen, EM Penningen, A Verspecht. 2007. Multifunctionality of Agriculture: A Review Definition, Evidence and Instruments. *Living Review in Landscape Research*. 1(3)
- Joni R. 2012. *Dampak Pengembangan Biodiesel dari Kelapa Sawit Terhadap Kemiskinan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Disertasi. Bogor:IPB
- Melling L, Goh KJ, R Hatanto. 2007. *Comparison Study Between GHG Fluxes from Forest and Oil Palm Plantation on Tropical Peat Land of Serawak Malaysia*. International on Oil Palm and Environment. Bali. Indonesia.
- Melling L, Hatanto R, Goh KJ. 2005. *Soil CO₂ Flux from Ecosystem in Tropical Peat Land of Serawak*. Malaysia. Tell us. 57: 1-11.
- Melling L, Goh KJ, Beavies, R. Hatanto. 2007. *Carbon Flow and Budget in A Young Mature Oil Palm Agroecosistem on Deep Tropical Peat*. Proceeding of The International Symposium on Tropical Peat Land. Jakarta.
- Moon W. 2012. *Conceptualizing Multifunctional Agriculture from a Global Perspective*. Departement Agribusiness Economics Southern Illinois University. Carbondale IL 62901.
- Moyer W, Josling T. 2002. *Agricultural Policy Reform: Politics and Process in the EU and US in the 1990s*. Burlington: Global Environmental Governance, Aldershot
- OECD. 2001. *Multifunctionality Towards An Analytical Framework*. OECD. Paris.
- Panayotou T. 1993. *Green Martkets: The Economic of Sustainable Development*. ICS Press. San Franssisco.
- PASPI. 2014. *Industri Minyak Sawit Indonesia Berkelanjutan*. Peranan Industri Minyak Kelapa Sawit Dalam Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Pedesaan, Pengurangan Kemiskinan dan Pelestarian Lingkungan. *Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute*. Bogor.
- PASPI. 2019. ISPO dengan Pendekatan Ekosistem: Sawit Menjadi Lebih Sustainable?. *Jurnal Monitor*. 5(46): 1722-1728
- Rofiq HN. 2013. *Economies Analysis of Palm Oil Plantation and Oil Palm Productivity in Effect on Percapita Income in Indonesia*. *International Institute of Social Studies*. Belanda: The Huge.
- Sabiham S. 2013. *Sawit dan Lahan Gambut dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Indonesia*. Himpunan Gambut Indonesia.
- Sato Y. 1997. *The Palm Oil Industry in Indonesia: Its Structural Changes and Competitiveness*. In *Waves of Change in Indonesia's Manufacturing Industry* (ed: M.E Pangestu and Y. Sato). Tokyo: Institute of Developing Economics
- Sumarto S. A Suryahadi. 2004. *Trade, Growth and Poverty in Indonesia*. *National Conference Of The University Outreach Network*. Bogor.
- Susila WR. 2004. Contribution of Palm Oil Industry to Economic Growth and Poverty Allevation in Indonesia. *Jurnal LITBANG Pertanian*. 23(3).
- Tomich TP, Mawardi MS. 1995. Evolution of Palm Oil Trade Policy in Indonesia

- 1978-1991. *Elaeis*. 7 (1): 87-102.
- World Bank. 2012. *Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development*. The World Bank Washington DC.
- World Growth. 2009. *Conversion The Immutable Link Between Forestry and Development*, Arlington VA.
- World Growth. 2011. *The Economic Benefit of Palm Oil to Indonesia*. World Growth.